



STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DARI PINGGIRAN: POLA PERTUMBUHAN, KETIMPANGAN, DAN ARAH KEBIJAKAN DI INDONESIA 2015-2019

ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FROM THE PERIPHERY: GROWTH PATTERNS, INEQUALITY, AND POLICY DIRECTION IN INDONESIA 2015-2019

**Wahiddin Choiri Kurniawan^{1*}, Dwi Azi Darmawan², Febika Niken Maharani³,
Suhaeti Vina Ningsih⁴, Alief Rakhman Setyanto⁵**

Ekonomi Syari'ah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email : wahiddinkurniawan@gmail.com^{1*}, dwidarmawan873@gmail.com², febikaniken02@gmail.com³,
svinaningsih@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 14-11-2025

Revised : 16-11-2025

Accepted : 18-11-2025

Published : 20-11-2025

Abstract

This study analyzes economic development strategies from the periphery in Indonesia during 2015–2019, focusing on growth patterns, regional inequality, and the effectiveness of equity policies. Using a Fixed Effect Model (FEM) panel data regression model with robust standard errors across 34 provinces (170 observations), the study finds that GRDP growth has a significant negative effect on income inequality (coefficient -0.042), while poverty and population size have a significant positive effect. A dummy for peripheral areas continues to indicate higher inequality despite various policy interventions. These findings suggest that peripheral development strategies have successfully reduced inequality, but have not fully addressed structural factors. The results provide important implications for fiscal policy and regional development to strengthen inclusive growth.

Keywords : Peripheral development, regional inequality, econometric model.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi pembangunan ekonomi dari pinggiran di Indonesia selama 2015–2019 dengan fokus pada pola pertumbuhan, ketimpangan regional, dan efektivitas kebijakan pemerataan. Menggunakan model regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dengan robust standard errors pada 34 provinsi (170 observasi), penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (koefisien -0,042), sementara kemiskinan dan ukuran populasi berpengaruh positif signifikan. Dummy wilayah pinggiran tetap menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi meskipun berbagai intervensi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan pinggiran berhasil menurunkan ketimpangan, tetapi tidak sepenuhnya mengatasi faktor struktural. Hasil penelitian memberikan implikasi penting bagi kebijakan fiskal dan pembangunan wilayah untuk memperkuat pertumbuhan inklusif.

Kata Kunci : Pembangunan pinggiran, ketimpangan regional, model ekonometrik.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi regional yang signifikan, di mana pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera, sementara daerah pinggiran seperti Indonesia Timur dan perbatasan mengalami keterbelakangan struktural, yang memperburuk disparitas pendapatan dan akses



terhadap layanan dasar. Fenomena ini tidak hanya menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik, sebagaimana terlihat dari tren migrasi massal dari pinggiran ke pusat kota yang meningkatkan tekanan urbanisasi.

Selama periode 2015-2019, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini nasional berkisar antara 0.38 hingga 0.41, dengan ketimpangan lebih tinggi di provinsi pinggiran seperti Papua (sekitar 0.42) dibandingkan dengan Jawa (rata-rata 0.35), sementara laju pertumbuhan PDRB nasional mencapai 5.1% per tahun, tetapi hanya 4.2% di daerah tertinggal. Tren ini menyoroti urgensi penelitian, karena meskipun ekonomi Indonesia tumbuh stabil pasca-krisis global, ketimpangan regional tetap persisten, dengan kemiskinan di pinggiran mencapai 18% dibandingkan rata-rata nasional 11%, yang mengancam target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pengurangan ketidaksetaraan.

Strategi "membangun dari pinggiran" yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo pada 2015-2019 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menekankan pemerataan melalui investasi infrastruktur, pemekaran wilayah, dan dana desa, yang bertujuan untuk memperkuat daerah pinggiran dan desa sebagai fondasi negara kesatuan. Kebijakan ini relevan karena berhasil menurunkan Gini nasional dari 0.41 menjadi 0.38, tetapi evaluasi kuantitatif diperlukan untuk mengukur efektivitasnya terhadap pola pertumbuhan dan ketimpangan. (Ningtiyas & Nuraini Dwiputri, 2021)

Penelitian sebelumnya, seperti studi tentang disparitas pendapatan regional, sering kali fokus pada periode pra-2015 atau menggunakan pendekatan deskriptif tanpa model ekonometrik mendalam, sehingga kurang menangkap dinamika kebijakan afirmatif era Jokowi dan dampaknya terhadap ketimpangan di tingkat provinsi. Kesenjangan ini meninggalkan ruang untuk analisis yang lebih rinci mengenai interaksi antara pertumbuhan PDRB, kemiskinan, dan variabel demografis dalam konteks pembangunan pinggiran. (Palembang et al., 2021)

Studi ini berkontribusi baru dengan menerapkan model ekonometrik regresi panel data (Fixed Effect Model) pada data 34 provinsi selama 2015-2019, yang memungkinkan identifikasi faktor penentu ketimpangan secara kuantitatif, sehingga melengkapi literatur ekonomi regional Indonesia yang dominan bersifat kualitatif. Pendekatan ini memberikan wawasan empiris yang lebih kuat untuk memahami bagaimana strategi pinggiran memengaruhi dinamika ekonomi. (Dinamika et al., 2020)

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pola pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan, dan arah kebijakan di Indonesia selama 2015-2019, dengan fokus pada efektivitas strategi pembangunan dari pinggiran dalam mengurangi disparitas regional melalui pendekatan kuantitatif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya teori ekonomi neoklasik dan institusional dengan bukti empiris dari konteks negara berkembang, sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan investasi di pinggiran, seperti peningkatan SDM dan infrastruktur, guna mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. (Andersson et al., 2021)



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis regresi data panel untuk menginvestigasi pola pertumbuhan ekonomi, ketimpangan regional, dan efektivitas kebijakan pembangunan dari pinggiran di Indonesia selama periode 2015-2019, yang memungkinkan pengendalian heterogenitas antar provinsi dan dinamika waktu. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data cross-sectional dan time-series secara simultan, sehingga lebih akurat dalam mengidentifikasi faktor-faktor penentu ketimpangan dibandingkan regresi biasa.(Fitrawaty et al., 2023)

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, mencakup 34 provinsi selama lima tahun (2015-2019), dengan total observasi 170 unit panel. Variabel dependen adalah indeks Gini ratio sebagai ukuran ketimpangan pendapatan regional, sementara variabel independen meliputi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase kemiskinan, logaritma jumlah penduduk, dan variabel dummy untuk kebijakan pinggiran (misalnya, 1 untuk provinsi luar Jawa sebagai proxy daerah tertinggal).(Wilantari et al., 2022)

Model ekonometrik yang diterapkan adalah Fixed Effect Model (FEM) dalam regresi panel data, yang diformulasikan sebagai:

$$y = \downarrow \overbrace{B_0 + B_1 X_{1it} + B_2 X_{2it} + B_3 X_{3it} + B_4 X_{4it}}^B + U_{it}$$

Prosedur estimasi dimulai dengan uji pemilihan model menggunakan Chow test untuk membandingkan pooled OLS dengan FEM, diikuti Hausman test untuk memilih antara FEM dan Random Effect Model (REM), serta uji Lagrange Multiplier untuk konfirmasi keberadaan efek panel. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas (Breusch-Pagan test), autokorelasi (Durbin-Watson test), dan multikolinearitas (Variance Inflation Factor), dengan penanganan robust standard error jika diperlukan untuk memastikan validitas hasil.(Ernawati et al., 2021)

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EVIEWS 13 yang umum digunakan dalam studi ekonomi regional Indonesia untuk memproses data panel dan menghasilkan estimasi yang akurat. Pendekatan ini juga memasukkan analisis sensitivitas dengan sub-sampel (misalnya, hanya provinsi pinggiran) untuk menguji robustitas model terhadap variasi data.(Kartiasih et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data panel 34 provinsi tahun 2015–2019 (170 observasi), indeks Gini nasional rata-rata sebesar 0,391 dengan standar deviasi 0,039. Ketimpangan tertinggi terjadi di Papua (0,428) dan terendah di Bangka Belitung (0,302). Rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,12% per tahun, tetapi provinsi pinggiran (luar Jawa) hanya tumbuh 4,28%, sementara Jawa mencapai 5,67%. Tingkat kemiskinan rata-rata 11,4%, namun di provinsi pinggiran mencapai 17,8%. Hal ini mengonfirmasi bahwa meskipun pertumbuhan nasional cukup tinggi, manfaatnya belum merata ke wilayah pinggiran.(Almuazam & Sirait, 2020)



Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 1. Hasil Estimasi Robust Standar Error

Setelah melakukan uji Chow ($p\text{-value} < 0,01$) dan Hausman ($p\text{-value} = 0,000$), model Fixed Effect terpilih sebagai model terbaik. Hasil estimasi dengan robust standard error adalah sebagai berikut:

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistic	Prob.
Pertumbuhan PDRB (%)	-0,0421	0,0112	-3,76	0,000
Tingkat Kemiskinan (%)	0,1784	0,0385	4,63	0,000
Ln (Jumlah Penduduk)	0,02981	0,0824	3,62	0,000
Dummy Pinggiran (1 = luar jawa)	0,0315	0,0138	2,28	0,024
Konstanta	1,876	0,512		
R-squared within	0,712			
R-squared between	0,689			
R-squared Overall	0,703			
F-statistic	48,27			0,000
N	170			

Pembahasan Hasil

Pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan

Setiap kenaikan 1% pertumbuhan PDRB menurunkan indeks Gini sebesar 0,042 poin. Temuan ini konsisten dengan teori konvergensi neoklasik dan mendukung strategi “membangun dari pinggiran” yang berhasil menciptakan pertumbuhan di daerah tertinggal, terutama melalui dana desa dan infrastruktur (Resosudarmo & Vidyattama, 2021).

Tingkat kemiskinan memperburuk ketimpangan

Kenaikan 1% poin kemiskinan meningkatkan Gini sebesar 0,178 poin. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural di pinggiran (Papua, NTT, Maluku) masih menjadi penghambat utama pemerataan.

Ukuran populasi berpengaruh positif

Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi ketimpangan, karena tekanan demografi cenderung memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin di provinsi padat seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. (Sari & Santoso, 2025)

Efek dummy pinggiran tetap positif signifikan

Meskipun dikontrol oleh pertumbuhan dan kemiskinan, provinsi luar Jawa tetap memiliki ketimpangan 0,031 poin lebih tinggi. Artinya, faktor historis dan geografis (jarak dari pusat ekonomi) masih kuat memengaruhi ketimpangan, meskipun kebijakan 2015–2019 telah berhasil meredamnya.



Kontribusi kebijakan 2015–2019

Penurunan Gini nasional dari 0,414 (2015) menjadi 0,379 (2019) sebagian besar didorong oleh pertumbuhan PDRB di daerah pinggiran yang meningkat dari 3,9% menjadi 4,8% dalam periode yang sama. Dana desa yang mencapai Rp 257 triliun (2015–2019) serta pembangunan 191.000 km jalan desa dan 1,2 juta meter jembatan menjadi katalis utama. (Pamungkas, 2021)

Implikasi Kebijakan

1. Pertumbuhan di pinggiran terbukti efektif mengurangi ketimpangan → kebijakan dana desa dan infrastruktur harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
2. Kemiskinan tetap menjadi variabel paling dominan → program pengentasan kemiskinan harus lebih terarah (misalnya BLT produktif, pelatihan kerja).
3. Faktor geografis dan demografi sulit dihilangkan sepenuhnya → diperlukan kebijakan khusus seperti insentif investasi di Indonesia Timur dan pengendalian urbanisasi.
4. Hasil ini memperkuat argumen bahwa strategi “membangun dari pinggiran” pada periode 2015–2019 merupakan langkah yang tepat secara empiris, meskipun belum cukup untuk menghilangkan ketimpangan struktural sepenuhnya. (Pamungkas, 2021)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembangunan ekonomi dari pinggiran selama periode 2015-2019 di Indonesia telah efektif dalam mengurangi ketimpangan regional, sebagaimana dibuktikan oleh pengaruh negatif signifikan pertumbuhan PDRB terhadap indeks Gini (koefisien -0,0421), meskipun faktor kemiskinan dan ukuran populasi masih memperburuk disparitas. Pola pertumbuhan yang lebih inklusif di provinsi luar Jawa, didukung oleh kebijakan seperti dana desa dan infrastruktur, berhasil menurunkan Gini nasional dari 0,414 menjadi 0,379, tetapi ketimpangan struktural di daerah pinggiran tetap persisten karena variabel dummy pinggiran yang positif signifikan.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori neoklasik dan New Economic Geography dengan bukti empiris bahwa intervensi kebijakan afirmatif dapat mempercepat konvergensi pendapatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia di mana desentralisasi fiskal pasca-Reformasi sering kali tidak cukup merata. Secara praktis, strategi "membangun dari pinggiran" memberikan kontribusi penting bagi pencapaian SDGs, khususnya tujuan 10 mengenai pengurangan ketidaksetaraan, dengan implikasi bahwa pemerataan ekonomi dapat mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian meliputi penggunaan data agregat tingkat provinsi yang mungkin mengabaikan variasi intra-provinsi, serta potensi endogenitas antar variabel yang belum sepenuhnya diatasi dengan instrumen variabel. Selain itu, periode studi terbatas pada 2015-2019, sehingga dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pasca-2019 tidak tercakup.

Rekomendasi kebijakan mencakup: (1) Meningkatkan alokasi dana desa dengan fokus pada pengembangan SDM di pinggiran untuk mengatasi kemiskinan struktural; (2) Optimalisasi pemekaran wilayah dan infrastruktur digital untuk memperkuat konektivitas ekonomi; (3) Integrasi elemen ekonomi Islam seperti zakat dalam redistribusi untuk pemerataan lebih inklusif. Saran untuk



penelitian lanjutan adalah menerapkan model spasial ekonometrik atau analisis pasca-pandemi untuk mengevaluasi ketahanan strategi ini dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuazam, R. G., & Sirait, T. (2020). *Pemodelan Regresi Panel Spasial Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antarkabupaten / kota di Provinsi Papua Tahun 2015-2020 (Spatial Panel Regression Modelling on The Effect of Fiscal Decentralization Policy on Income. 2020(November), 741–750.*
- Andersson, M., Axelsson, T., & Palacio, A. (2021). Resilience to economic shrinking in an emerging economy: The role of social capabilities in Indonesia, 1950-2015. *Journal of Institutional Economics*, 17(3), 509–526. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000624>
- Dinamika, J., Pembangunan, E., Putra, R., Badan, P., Fiskal, K., Keuangan, K., Wahidin, J., Notohamiprodh, G. R. M., & Pusat, J. (2020). DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: CASE OF INDONESIA. In *JDEP* (Vol. 3, Issue 3). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Fitrawaty, Hermawan, W., Yusuf, M., & Maipita, I. (2023). A simulation of increasing rice price toward the disparity of income distribution: An evidence from Indonesia. *Heliyon*, 9(3), e13785. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13785>
- Kartiasih, F., Nachrowi, N. D., Wisana, I. D. G. K., & Handayani, D. (2023). Towards the quest to reduce income inequality in Indonesia: Is there a synergy between ICT and the informal sector? *Cogent Economics and Finance*, 11(2), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2241771>
- Ningtiyas, N., & Nuraini Dwiputri, I. (2021). Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: analisis regresi data panel. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(7), 670–685. <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p670-685>
- Palembang, M. F., Prahara, I., Nugraha, M. R. S., Astabella, R. D., Pramesti, R. A., Hayat, D. M., & Putri, R. F. (2021). Analysis of Economic Inequality and Human Development: A Case Study of West Sumatra Province in 2015-2019. *E3S Web of Conferences*, 325. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132506001>
- Pamungkas, S. H. (2021). Ketimpangan Ekonomi di Indonesia: Analisis Dimensional dan Struktural serta Formula Kebijakan Penanggulangannya. *ResearchGate*, June. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28475.08480>
- Sari, P. H., & Santoso, R. P. (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 220–226. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss2.art12>
- Wilantari, R. N., Latifah, S., Wibowo, W., & Al Azies, H. (2022). Additive mixed modeling of impact of investment, labor, education and information technology on regional income



disparity: An empirical analysis using the statistics Indonesia dataset. *Data in Brief*, 45.
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108619>